

ANALISA PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PROGRAM LITERASI MEDIA DI KOTA SAMARINDA

Roosye Carolina¹, Hairunnisa², Johantan Alfando WS³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Program Literasi Media di Kota Samarinda. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik. Jenis data yang disajikan melalui observasi dan wawancara menggunakan data primer yaitu sumber data dua key informan yakni Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Koordinator Bidang Kelembagaan Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan informan pendukung dari Komisioner dari setiap bidang, data sekunder melalui sumber data dokumen berupa Undang - Undang, buku-buku, serta jurnal yang di download melalui internet dan dari beberapa dokumentasi foto penelitian. Kemudian teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur memberikan edukasi kepada masyarakat kota Samarinda dalam penggunaan media konvensional sebagai alat bantu komunikasi massa dengan mengelola kembali setiap pesan yang diterima agar dapat mengurangi penyebaran pesan hoax atau berita palsu yang merugikan masyarakat lainnya, hal ini dilaksanakan dalam suatu program yaitu program literasi media. Sasaran program ini ditujukan kepada remaja dan dewasa dikarenakan penggunaan media konvensional lebih banyak digunakan. Walaupun ranahnya penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap mengajak masyarakat kota Samarinda untuk memilih siaran yang sehat dan mendidik guna menghindari hal-hal yang merugikan masyarakat dalam menonton televisi.

Kata Kunci: *Penggunaan Media Konvensional, Berita Hoax, Literasi Media, Pesan Komunikasi*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: troosye@gmail.com

² Dosen Pembimbing I dan Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing II dan Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

PENDAHULUAN

Media hadir di kehidupan masyarakat sebagai alat bantu komunikasi individu dengan individu yang lain. Selain bertemu secara langsung untuk berkomunikasi atau bertukar pesan, media digunakan untuk menyebarkan pesan kepada individu atau kelompok yang akan menerima pesan tersebut. Mulai berkembangnya jaman semakin banyak penemuan alat-alat media komunikasi yang ditemukan. Bahkan adanya teknologi dengan memberikan pesan secara satu arah dengan lebih luas penyebaran pesannya tanpa harus menyebarkan secara satu-persatu, dan media ini disebut dengan media konvensional. Hadirnya media konvensional menjadi salah satu media komunikasi massa yang luas dan awal penggunaannya tidak banyak karena masih harus dikembangkan terus agar media ini mudah digunakan oleh banyak orang. Media konvensional sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu media cetak dan media penyiaran. Dua jenis media konvensional ini begitu banyak digunakan masyarakat khususnya di Indonesia, awal penggunaan media konvensional di Indonesia pada era reformasi, hal ini membantu pemerintahan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat Indonesia.

Semakin banyak media konvensional yang bermunculan melalui lembaga penyiaran seperti televisi dan radio, tidak dapat dipastikan apa saja isi siaran yang diberikan kepada masyarakat. Maka dari pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, melalui Komisi Penyiaran Indonesia bertugas untuk mengawasi setiap lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Semakin berkembang dunia siaran, maka banyak lembaga siaran yang mulai memasuki daerah-daerah lainnya di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, yaitu televisi lokal yang ada dan mulai muncul untuk memberikan informasi kepada masyarakat daerahnya sendiri. Maka dengan hal itu Komisi Penyiaran Indonesia membentuk suatu lembaga yang khusus menangani dan mengawasi lembaga penyiaran yang ada di daerahnya masing-masing disetiap provinsi yang ada, maka terbentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Salah satunya yang terbentuk ialah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur hadir dalam mengawasi dan menangani setiap lembaga penyiaran yang ada di Kalimantan Timur. Salah satu tugas yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia hal ini diterangkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga mengawasi setiap isi konten siaran disetiap lembaga penyiaran radio dan televisi, dan memantau jika ada lembaga penyiaran yang tidak mempunyai ijin siaran maka pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur turun memberikan sosialisasi tentang pengurusan ijin dan membujuk pihak lembaga penyiaran untuk membuat surat ijin siaran agar tidak layak untuk siaran dan menyebarkan konten yang layak untuk diterima oleh masyarakat Kalimantan timur khususnya kota Samarinda.

Mengenai pengurusan soal ijin siaran, banyak dari lembaga penyiaran belum memiliki surat ijin siaran untuk menjalankan lembaga penyiarannya, dengan banyak alasan yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan disitu pihak lembaga penyiaran juga merasa dibatasi dalam memberikan konten siara yang akan diberikan kepada masyarakat kota Samarinda. Maka bermula dari situlah banyak konten-konten siaran yang tidak patut untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat memicu pesan-pesan *hoax* atau palsu yang tersebar melalui konten siaran oleh lembaga penyuaran yang tidak memiliki ijin siarannya. Pesan-pesan *hoax* tidak hanya tersebar dimedia sosial saja tetapi melalui lembaga penyiaran yang tidak berijin dapat saja menyebarkan pesan-pesan *hoax* yang dapat merugikan masyarakat kota Samarinda. Bahkan lembaga penyiaran yang sudah legal saja dapat terkena dampak berita *hoax* dan menyebarkan kepada masyarakat hingga akhirnya masyarakat luas dengan mudah menerima pesan *hoax* tersebut.

Maka dengan itu pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai tidak tinggal diam melihat kasus-kasus pesan-pesan *hoax* yang tersebar melalui lembaga-lembaga penyiaran yang ada di provinsi Kalimantan Timur khususnya kota Samarinda. Dengan itu dari pusatnya Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan suatu kebijakan tentang literasi media. Pengertian literasi media sendiri yaitu melek media, melaksanakan program ini memberi wawasan kepada masyarakat Kota Samarinda sesuai dengan keadaan sekarang, mengajarkan kepada masyarakat Kota Samarinda bagaimana mengelola setiap pesan yang diterima dan menyebarkan kembali kepada masyarakat yang lain, meningkatkan pola pikir masyarakat setiap pesan yang disebar untuk tidak mudah mempercayai pesan tersebut sebelum mengetahui latar belakang pesan tersebut. Kebijakan tersebut turun ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalankan program tersebut sesuai dengan ketetapan dari pusat. Hal ini juga menjadi kegiatan edukasi bagi masyarakat kota Samarinda bagaimana menggunakan media konvensional yang cermat dan menyaring setiap pesan yang diterima baik dari lembaga penyiaran yang ada di radio atau televisi.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus aktif menjalankan program literasi media kepada masyarakat kota Samarinda khususnya orang tua, anak dan remaja, kenapa sasarannya diumur yang sudah ditentukan karena diumur itulah lebih mudah individu menerima pesan tersebut tanpa memfilter terlebih dahulu setiap pesan yang diterimanya. Program ini mulai dilaksanakan dari tahun 2017 sampai sekarang dan bahkan bergantinya kepengurusan program literasi media ini dijadikan program berkelanjutan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Program literasi media oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini juga turut mengundang lembaga pemerintahan, lembaga penyiaran dan perguruan tinggi untuk mengajak menjadi rekan kerjasama dalam mengadakan kegiatan literasi media bagi masyarakat kota Samarinda.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan program Literasi Media di Kota Samarinda?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan program Literasi Media di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan program Literasi Media di Kota Samarinda
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penerapan program Literasi Media di Kota Samarinda

Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis, Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya perbendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan Analisa Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Program Literasi Media untuk Masyarakat Kota Samarinda. Serta sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan juga berguna bagi kedua belah pihak, baik pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan juga kalangan masyarakat. Dimana hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan Literasi Media.

TEORI DAN KONSEP

Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto, (2002) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Maka dari itu peran dan kedudukan menjadi dua hal yang penting, keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lainnya.

Indikator Peran

1. Peran sebagai Regulator
Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan peyelenggaraan pembangunan pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
2. Peran sebagai Dinamisator
Menggerakkan partisipasi multipihak takala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan pemerintahan berperan memberikan melalui penyuluhan

maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Peran sebagai Fasilitator

Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan, mengoptimalkan pembangunan daerah, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman. Menyediakan sarana dan prasarana pembangunan seperti pendamping dan pendanaan/permodalan.

4. Peran sebagai Katalisator

Pemerintah sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Teori Peran

Teori sistem ini digunakan Karl Weick untuk mempelajari bagaimana organisasi mengelola informasi. Teori Sistem ini juga dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy (1968) menjelaskan bahwa pola – pola interaksi dan keseluruhan selalu ada dalam setiap sistem, jika terjadi gangguan pada salah satu bagian dalam suatu sistem maka gangguan itu akan memengaruhi keseluruhan sistem.

Teori sistem ini bermanfaat dalam berbagai bagian organisasi, karena dalam organisasi terdiri beberapa departemen atau bidang yang berbeda, walaupun semua bidang mempunyai *job desk* nya masing – masing, namun untuk mencapai suatu tujuan organisasi membutuhkan kegiatan untuk saling berbagi informasi dan mengintegrasikan informasi itu untuk mencapai solusi dan kesimpulan.

Literasi Media

Literasi Media sebagai suatu rangkaian gerakan melek media, yaitu: gerakan melek media dirancang untuk meningkat kontrol individu terhadap media yang mereka gunakan untuk mengirim dan menerima pesan. (Baran dan Dennis : 2010) Dapat dikatakan literasi media memiliki peran sebagai pengingat dan memfilter pesan yang diterima oleh individu.

Bertelsmann dan AOL Time Warner (2002) menyatakan bahwa literasi media mencakup, yaitu:

1. Literasi Teknologi

Kemampuan memanfaatkan media baru seperti internet agar bisa memiliki akses dan mengomunikasikan informasi secara efektif.

2. Literasi Informasi

Kemampuan mengumpulkan, mengorganisasikan, menyaring, mengevaluasi dan membentuk opini

3. Kreativitas Media

Kemampuan yang terus meningkat pada individu dimana pun berada untuk membuat dan mendistribusikan isi kepada khalayak berapa pun ukuran khalayak.

4. Tanggung jawab dan kompetensi sosial
Kompetensi untuk memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi publikasi secara *online* dan bertanggung jawab atas publikasi tersebut, khususnya pada anak-anak.

Definisi Konsepsional

Analisa Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Program Literasi Media Untuk Masyarakat Kota Samarinda, yaitu melihat bagaimana peran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mensosialisasikan atau memberikan informasi mengenai pengenalan dan penggunaan media konvensional yang guna membantu dalam menyebarkan dan menerima pesan ke khalayak. Menjadikan masyarakat yang paham akan melek media dan memfilter pesan atau informasi yang diterima oleh khalayak lain.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif, suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. (Creswell: 2008)

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk membatasi tentang apa saja yang dibahas dalam penelitian. Selain itu fokus penelitian juga membantu peneliti untuk membahas aspek - aspek secara mendalam yang diteliti nya. Adapun fokus dalam penelitian Analisa Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Program Literasi Media untuk Masyarakat Samarinda yang tertuju oleh unsur-unsur Peran, yaitu :

1. Regulator
2. Dinamisator
3. Fasilitator
4. Katalisator

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, Penelitian ini juga menggunakan metode area sampling, dimana pada dasarnya metode ini merupakan metode pemilihan sampel dengan tujuan tertentu (*purposive sampling*) yang sesuai dengan bidangnya. Adapun yang menjadi narasumber kunci atau *key informant* yaitu, Bapak Hendro Prasetyo, S.Sos Sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan

Timur dan Andi Muh. Abdi.,M.I.Kom sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti Undang – undang, sumber buku, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai Program Literasi Media oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda.

Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Teknik analisis ini dari Miles & Huberman yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang di dapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan tahapan sebagai berikut: (Sugiyono:2012) ada empat tahap, pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Peran sebagai Regulator

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah membuat kebijakan mengenai Program Literasi Media bagi masyarakat Kota Samarinda, kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia dan Undang-Undang 32 tahun 2002). Kebijakan tersebut selaras dengan Visi dan Misi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan tersebut dimasukkan dalam rapat per satu tahun.

Peran sebagai Dinamisator

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur turut aktif dalam memberikan wawasan Literasi media melalui seminar, sosialisasi dan ruang diskusi baik masyarakat umum, tingkat sekolah hingga tingkat perguruan tinggi. Komunikator dalam menjalankan program Literasi media adalah para Komisionaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, dari lembaga-lembaga penyiaran, dan pakar ahli komunikasi dari perguruan tinggi di Kota Samarinda.

Peran sebagai Fasilitator

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan media konvensional dalam menyampaikan pesan-pesan literasi media kepada masyarakat kota Samarinda. Melalui media baru, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur hanya menggunakannya sebagai

pemberitahuan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sebagai pengumuman kegiatan yang akan dilaksanakan.

Peran sebagai Katalisator

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan partisipasi masyarakat Kota Samarinda aktif mengikuti kegiatan literasi media yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan sasaran audiens nya. Masyarakat Kota Samarinda juga merespon dengan baik informasi literasi media yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tetapi untuk menentukan ukuran penerimaan atau dampak yang dialami oleh masyarakat Kota Samarinda secara riset

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu bulan yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan pengamatan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan program literasi media di kota Samarinda. Jumlah pertanyaan yang digunakan peneliti dalam wawancara berjumlah 11 pertanyaan kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Koordinator bidang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kepada 3 komisionaris lainnya yang mengetahui program literasi media.

Dari dua informan kunci dan tiga informan yang terpilih secara *purposive sampling*, didapatkan informasi yang dapat menggambarkan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam program literasi media di kota Samarinda. Peneliti akan memberikan uraian dan penjelasan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama dengan informan kunci dan informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan serta dari hasil observasi dan pengamatan di lokasi yang terkait dengan objek penelitian.

Pembahasan

Dalam membuat kebijakan pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Proivinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa kebijakan ini sesuai dengan visi dan misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Proivinsi Kalimantan Timur hal tersebut dipaparkan oleh kedua *key informan*, menjadikan suatu kewajiban dalam membuat sesuatu hal yang harus sesuai dengan visi dan misi, bahkan tetap sesuai dengan acuan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI). Didalam Peraturan Komisi Penyiaran Indoenesia Nomor 01 tahun 2014 tertera pada Bab II Kedudukan dan Pengorganisasian KPI Bagian Keempat Rencana Strategis dan Program KPI. Pasal 5 point 1 Hal ini menyatakan adanya tiga pola pendekatan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu, pendekatan regulasi, pendekatan partisipasi dan

pendekatan edukasi. Dari ketiga pola pendekatan ini, program literasi media masuk dipendekatan edukasi. Memberikan wawasan kepada masyarakat kota Samarinda untuk lebih bijak dalam penggunaan media di era saat ini.

Pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bagaimana program literasi media ini dilaksanakan, salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan ini dinamai “Kritis Bermedia, Wujudkan Pemilu Damai dan Beretika Tanpa Hoax” kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat Kota Samarinda dengan kategori yang berbeda-beda seperti, dari Organisasi Masyarakat, Organisasi Mahasiswa, Mahasiswa, Pelajar, guru, wartawan dan masyarakat umum lainnya. Selebihnya pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur biasanya diundang oleh beberapa lembaga penyiaran dan dinas pemerintahan seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam mengadakan kegiatan literasi media, diundang sebagai moderator atau mengisi sebagai pembicara untuk memberikan pesan tentang literasi media, mengadakan *workshop*, seminar, atau sosialisasi di beberapa sekolah atau Universitas yang ada di Kota Samarinda, dan mengadakan ruang diskusi yang membahas tentang penggunaan media di era saat ini.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan mulai mengadakannya melalui media baru seperti media sosial, hal ini dapat dikatakan lebih mudah menjangkau masyarakat dan dengan lebih mudah memberi pesan literasi media kepada masyarakat Kota Samarinda, sehingga selain mengadakan secara tatap muka tapi melalui dunia maya dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media, walaupun menggunakan media sosial, tetap ada kekurangan yang dimiliki oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu dimana mereka kekurangan SDM humas yang mengakses media sosial sebagai media yang digunakan untuk memberikan pesan literasi media, jadi akun sosial dan web yang ada lebih aktif digunakan untuk menyebarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat dikatakan masih lebih aktif menjalankan program literasi media secara turun langsung ke lapangan dan bertemu secara langsung kepada audiens untuk memberikan pesan literasi media.

Menurut hasil penelitian, mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan literasi media oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dipaparkan oleh kedua *key informan* menyatakan masyarakat merespon cukup baik untuk ikut dalam kegiatan literasi media yang diadakan, respon yang positif oleh masyarakat saat kegiatan ini berlangsung, dan menyatakan bahwa masyarakat juga sebagai rekan kerjasama yang baik bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur karena dapat melaporkan jika didapati konten media atau siaran yang meresahkan atau mengganggu dapat menghubungi pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dapat ditindaklanjuti. Tidak hanya sebagai pendengar dan penerima pesan informasi literasi media bahkan menjadikan

masyarakat turut aktif dalam memberantas penggunaan media yang tidak baik di Kota Samarinda secara tidak langsung menjadi agen pengawasan secara individual bagi lingkungan sekitar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Program Literasi Media di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat kebijakan program literasi media yang acuannya dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 tahun 2014. Tertera point literasi media, maka program literasi media dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan sesuai standar Undang-Undang 32 tahun 2002 dan program ini dibuat sebagai program berkelanjutan
2. Dalam proses pelaksanaan program literasi media ini, ada beberapa metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan literasi media kepada masyarakat Kota Samarinda, seperti seminar, sosialisasi, ruang diskusi dan kegiatan *workshop*. Program ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran khalayak yang akan diberikan pesan literasi media seperti mengadakannya di tingkat pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki Rekan kerjasama dalam melaksanakan program literasi media ini, seperti dinas pemerintahan, lembaga swasta, lembaga penyiaran, pakar komunikasi, wartawan dan dosen. Menambahkan wawasan literasi media tidak hanya dari segi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dalam menjalankan program literasi media dapat ditemukan adanya hambatan, bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu belum diadakannya secara riset data untuk menghitung penerimaan masyarakat mengenai wawasan literasi media yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kurangnya sumber daya manusia dalam mengadakan setiap kegiatan ataupun yang mengelola website resmi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur karena keterbatasan anggota humas.

Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas dan setelah dilakukan penelitian, ada beberapa saran bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Diharapkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih aktif mengadakan program literasi media, tidak hanya diundang sebagai moderator tetapi menjadikan program ini sebagai kegiatan tahunan yang berkelanjutan agar terus mengingatkan kepada masyarakat Kota

Samarinda pentingnya penggunaan media yang bijak dan baik dan jauh dari berita-berita *hoax* atau palsu

2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mulai aktif dalam penggunaan media baru atau media sosial sebagai alat penjangkau masyarakat dalam menjalankan program literasi media, akan lebih mudah memberikan pesan literasi media kepada masyarakat Kota Samarinda.
3. Sebaiknya diadakan hasil riset atau pengumpulan secara data atas respon masyarakat setelah mengikuti program literasi media yang diadakan, hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadikan program literasi media ini lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Iriantara, Yosol. 2009. *Literasi Media*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Nurudin. 2011. *Pengantar Komunikasi Massa*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ardianto, Elvinaro & Komala, Lukiaty & Karlinah, Siti. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar edisi Revisi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Wahyuni, Isti Nursih. 2014. *Komunikasi Massa*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, PT. LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta
- Cangara, H. Hafied. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Denzin, Norman K. & Lincoln Yvonna S. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Jogja
- Morissan. 2009. *Teori Komunikasi Organisasi*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos. M.Si. 2006. *Sosiologi Komunikasi*, Kencana, Jakarta
- Prof. Dr. I Gde Pitana, M.Sc. 2005. *Sosiologi Pariwisata*, Penerbit Andi, Jakarta

Jurnal :

- Budiyanto. 2014. "Pengembangan Education Game Untuk Pembelajaran Perbaikan Sistem Pengisian dan Identifikasi Komponen – Komponennya". Universitas Negeri Semarang
- Andersen. 2014. "Keterampilan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membuat Program Tahunan di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Situs Web :

<http://www.unmul.ac.id/post/fisipol-dan-kpid-kaltim-kerjasama-bidang-literasi-media-1495526698.html> (diakses pada Kamis 22 November 2018)

<http://detakkaltim.com/index.php/2018/10/28/kpid-kaltim-gelar-literasi-media-abdi-penting-sebagai-edukasi-terhadap-publik/> (diakses pada Kamis 22 November 2018)

<https://www.kaltiminside.com/kpid-kaltim-siap-edukasi-masyarakat-dengan-literasi-media/> (diakses pada Minggu 25 November 2018)

<https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2018/08/06/49/proyeksi-penduduk-kota-samarinda-menurut-jenis-kelamin-2010-2020.html> (diakses pada Senin 09 Desember 2019)

Dokumen :

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang Dibentuk Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 PKPI 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Desiminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia